

Implementasi Program BUMKam di Kampung Tahima Soroma Kota Jayapura

Adrian Vanderbijl Sibarani, Nur Aedah, Hiskia C.M. Sapioper

Program Magister Kebijakan Publik, Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi: nuraedah_2403@yahoo.com

ABSTRACT:

This research aims to examine and analyze the implementation of the Village-Owned Enterprise Program Policy in Tahima Soroma Village, South Jayapura District, Jayapura City, while also identifying the supporting and inhibiting factors that influence its execution. Additionally, it seeks to evaluate the various efforts made to implement this policy as part of broader strategies for poverty eradication and improving the welfare of the village community. Using a qualitative descriptive research method, this study relies on both primary and secondary data sources, collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation analysis. The findings indicate that the implementation of the Village-Owned Enterprise Program Policy in Tahima Soroma Kayo Village has not yet been fully successful, as several key indicators of policy effectiveness remain unmet. The supporting and inhibiting factors identified in this research include welfare-related aspects, community participation levels, accessibility to necessary resources, and the degree of control exerted over the program's operations. Despite these challenges, efforts to implement this policy continue to be pursued, recognizing its significant role in fostering economic empowerment, enhancing local entrepreneurship, and ultimately improving the overall standard of living for the village community.

Keywords: Implementation, Policy, Program, Village-Owned Enterprises, Tahima Soroma, Jayapura City

Received: 26-02-2025

Accepted: 02-03-2025

Published: 04-03-2025

1. PENDAHULUAN

Era otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi kampung juga memiliki otonomi kampung yang dimana kampung memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesajahteraan masyarakat yang ada di kampung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang Kampung.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka kampung harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan

kampungnya. Meski sekarang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kampung akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Miliar yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang kampung, akan tetapi kampung tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana kampung tidak ada dan kampung harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Kampung yang maksimal. Maka dari itu kampung harus menggali potensi kampung baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kampung tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan kampung dan akan masuk kedalam kas kampung atau keuangan kampung (Pentury, dkk, 2023; Bisri, dkk, 2023).

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia pada khususnya masyarakat kampung tentu dicapai melalui beberapa kebijakan atau kebijakan sebuah program yang sudah berjalan sejak adanya otonomi daerah sebagai bentuk kebijakan pembangunan kampung. Kebijakan Pembangunan Kampung adalah langkah yang akan diambil oleh semua perangkat suatu organisasi dengan rencana untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Namun kenyataannya, pembangunan kampung masih kurang secara optimal, masih banyak kampung yang masuk kategori tertinggal (Siddik, 2015). Tetapi di sisi lain berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini mentransformasi kampung tertinggal dengan meningkatkan anggaran pembangunan kampung tahun demi tahun, untuk mengurangi jumlah kampung yang tertinggal (Suharto, 2005).

BUMKam merupakan badan usaha milik kampung yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi kampung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMKam dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMKam juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat kampung secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat kampung. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Istilah BUMKam tersebut juga muncul melalui PP Nomor 11 tahun 2021 Badan Usaha Milik Kampung. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi: "Badan Usaha Milik Kampung atau yang disebut BUMKam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung" Sebagai lembaga usaha kampung, BUMKam dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kampung dalam upaya

memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kampung yang disepakati melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan peraturan kampung.

Pengaturan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di atur dalam UU terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung juga di singgung Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMKam, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung yang dipisahkan guna mengelola aset-aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMKam semakin di perjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Pemdes Nomor 4 Tahun 2015 di jelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMKam, siapa saja yang berhak meneglola BUMKam permodalan BUMKam, jenis usaha yang di perbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMKam di atur dalam permen ini.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) didirikan hampir diseluruh kawasan kampung yang tersebar di Indonesia, begitu juga dengan salah satu kampung yang bernama Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau yang berlokasi tepatnya di Distrik Selatan Kota Jayapura. Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dari enam kampung lainnya yakni Kampung Enggros, Kampung Holtekam, Kampung Mosso, Kampung Skow Yambe, Kampung Kayo Batu, dan Kampung Waena yang melaksankan program BUMKam dalam pemberdayaan masyarakat kampung oleh Pemerintah Kampung.

Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau mendirikan BUMKam berdasarkan hasil musyawarah Kampung sebagai upaya pendayagunaan potensi sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya dan alam, mampu dikelola sebesar-besarnya oleh kampung khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAKam) Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau.

Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau ternyata memiliki kondisi BUMKam pada umumnya tidak dapat berkembang dengan baik, dimana pada umumnya BUMKam tidak beroperasi dengan lancar sebagaimana mestinya. Tentu hal ini, sangat merugikan masyarakat dan pemerintah yang mengharapkan ekonomi tumbuh dan berkembang dari kekuatan masyarakat yang ada di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kota Jayapura belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMKam ke Pemerintah Kampung, seperti bimbingan teknis mengenai BUMKam, pembinaan terhadap pengurus BUMKam, dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMKam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Sugiyono, 2009: 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang mengenai Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilakukan di tempat yang sesuai dengan penelitian mengenai Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, karena kampung ini memiliki sebuah Badan Usaha Milik Kampung yang telah berdiri.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut, untuk itu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2006) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) menemakan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu transmisi; Kejelasan; konsistensi. (2) Sumberdaya, sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf; Informasi; Wewenang; Fasilitas. (2) Disposisi, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah Pengangkatan Birokrat; Insentif. (4) Struktur Birokrasi, dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja

struktur birokrasi / organisasi ke arah yang lebih baik, adalah Melakukan *Standar Operating Prosedurs* (SOPs); Melaksanakan Fragmentasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu maupun lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana maupun sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah lembaga usaha kampung yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan kampung dalam upaya memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kampung. Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, BUMKam didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAKam). Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di perkampungan, BUMKam harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMKam mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di perkampungan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan pemerintah kampung sebagai pendiri BUMKam bersama masyarakat diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas potensi intervensi yang merugikan dari pihak ketiga. Pemerintah kampung harus ikut berperan pada pembentukan BUMKam sebagai badan hukum yang berpegang pada tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pembentukan BUMKam masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan pembentukan BUMKam belum dapat tercapai sesuai dengan mestinya (Maryuan, 2007).

3.1. Implementasi Program BUMKam di Kampung Tahima Soroma Kota Jayapura

Implementasi kebijakan publik memberikan ruang bagi sebuah kebijakan yang dirumuskan untuk secara aktif dilaksanakan. Pada proses implementasi tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan. Edward III mengemukakan ada 4 hal penting yang mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan kesesuaian struktur birokrasi.

3.1.1. Komunikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa, komunikasi yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangkan seluruh anggota pengurus dan perwakilan dari pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Komunikasi tersebut digunakan untuk membahas program-program kerja Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Hanya saja dari komunikasi tersebut, intensitas dan fokus anggota untuk mengikuti rapat masih kurang. Selain komunikasi antar organisasi, dari wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan data mengenai aktivitas pelaksana.

Berdasarkan data yang didapat dan teori dari indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dapat dianalisis bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sifatnya sudah terstruktur dengan baik yaitu rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hanya saja dari komunikasi tersebut belum bisa menciptakan koordinasi secara menyeluruh, dikarenakan kurangnya intensitas dari anggota yang menghadiri rapat tersebut. Sedangkan aktivitas pelaksana yang diwujudkan dalam program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sejauh ini sudah masuk ketahapan pemberdayaan walaupun belum keseluruhan. Hal tersebut terkendala dari minat para peserta pelatihan yang masih kurang sehingga untuk ke tahap pemberdayaan belum bisa dicapai secara maksimal.

3.1.2. Sumber Daya

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau juga akan dikaji di sini. Peneliti mendapatkan data bahwa sumber daya finansial Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sudah cukup untuk operasional setiap programnya. Dana tersebut berupa bantuan baik penyertaan modal dari pemerintah kampung maupun bantuan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data dan teori tersebut, maka dapat dianalisis bahwa sumber daya yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau masih kurang. Hal tersebut dikarenakan dari struktur kepengurusan hanya ada kepengurusan inti. Sehingga kurangnya tenaga untuk proses implementasi program. Selain itu, sumber daya manusia yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sifatnya masih relawan dan merupakan pekerja sosial. Maka sangat sulit untuk mencari orang-orang yang betul-betul mau bekerja untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Sedangkan dari sumber daya finansial Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dapat dikatakan cukup untuk operasional program. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan modal untuk setiap tahunnya. Sehingga dari dana tersebut dapat

menunjang implementasi program BUMKam dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

3.1.3. Disposisi

Sikap dan kecenderungan para pelaksana menjadi salah satu penentu dalam proses pengimplementasian suatu program. Berdasarkan data yang didapatkan, sikap dan kecenderungan para pelaksana adalah berupa sikap penerimaan atas program pemberdayaan yang telah dibuat. Penerimaan tersebut berasal dari organisasi formal seperti pemerintah desa, tetapi dari organisasi informal seperti organisasi masyarakat belum menerima program tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pihak pelaksana dan Masyarakat.

Dari data dan teori yang disebutkan di atas, dapat dianalisis bahwa sikap dan kecenderungan para agen pelaksana program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau masih berupa sikap penerimaan yang belum menyeluruh. Sehingga masih diperlukannya sosialisasi kepada pihak masyarakat agar program tersebut dapat diterima secara penuh oleh berbagai lapisan organisasi dan masyarakat. Selain itu, pola kebijakan yang sifatnya *top-down* menyebabkan para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan keinginan atau permasalahan yang dialami oleh Masyarakat.

3.1.4. Struktur Birokrasi

Proses implementasi program Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi ukuran keberhasilan program tersebut berupa target peserta dan output atau hasil yang didapatkan oleh masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Dari paparan data dan teori diatas, ukuran keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih dalam skala kecil. Selain itu, tujuan dari program tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan menghasilkan output yang diharapkan. Dari implementasi program Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mengenai struktur birokrasi tersebut belum ada kejelasan. Artinya belum ditetapkan target khusus kapan program tersebut bisa memberdayakan seluruh masyarakat kampung. Sehingga dapat dikatakan program tersebut hanya berjalan apa adanya.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BUMKam di Kampung Tahima Soroma Kota Jayapura

Proses implementasi kebijakan publik tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan penghambat tersebut memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi sebuah kebijakan publik.

3.2.1. Faktor Pendukung

Pertama, Kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi Dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi Dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh keberadaan BUMKam adalah, menyusun rencana kemitraan usaha antar desa dan berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar mendukung kebutuhan pelayanan publik warga dan lapangan kerja terbuka, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perbaikan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan utama dan pendapatan bagi masyarakat perkampungan.

Kedua, Partisipasi. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Program BUMKam. Faktor yang menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat adalah faktor kemauan dari masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMKam adalah yang terpenting. Inisiatif masyarakat perkampungan BUMKam dalam mengembangkan usaha dan perekonomian pedesaan perlu ditangani dengan hati-hati. Dukungan penuh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi perkampungan kuat dan menjanjikan. Visi pemerintah untuk keberlanjutan BUMKam terkonfirmasi dalam upaya menumbuhkan BUMKam dengan menyediakan pendanaan.

3.2.2. Faktor Penghambat

Pertama, Akses. Keberadaan BUMKam memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian di kampung, pengoptimalan aset di kampung, dan meningkatkan program usaha masyarakat kampung. Meskipun dalam penganggaran dana BUMKam sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dan transparansi, bukan berarti tidak memiliki masalah dalam pembuatan laporan keuangan BUMKam. Semakin berkembang BUMKam maka semakin kompleks pula kendala yang akan dialami. Pengelola atau pengurus dan masyarakat dalam pengelolaan BUMKam merasa rumit dalam mengakses karena tidak ada sarana dan prasarana terkhusus untuk BUMKam. Hal itu dapat dilihat ada banyak tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan semaksimal mungkin, mengenai laporan harian, dan lain-lain. Sehingga kinerja pelaku pengelola tidak terhambat adanya sarana dan prasarana BUMKam, sehingga pengelolaan BUMKam berjalan dengan baik, dan maju untuk kedepannya.

Kedua, Kontrol. Kehadiran Badan Usaha Milik Kampung dalam pelaksanaan program dan operasional tidak dapat dipisahkan dari anggotanya. Sebagai sebuah institusi keberadaan modal komersial adalah salah satu denyut nadi kehidupan dan tumbuh. Kesiapan modal perusahaan pun akan mengalami kemunduran. Pelaksanaan kegiatan keterlibatan masyarakat yang tinggi pada kegiatan BUMKam oleh BUMKam dan kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Kampung. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya potensi kampung, dikarenakan belum bisa dikembangkan oleh

BUMKam karena tidak ada pengontrolan. Selain itu, administrator bekerja secara sukarela tanpa ada gaji setiap bulan.

BUMKam berperan penting dan menyediakan masyarakat berkontribusi, tidak bisa dikatakan sebagai yang terbesar, yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan penduduk masih ada. Hal tersebut karena masih banyak hambatan seperti kurangnya dana, pengetahuan publik dan kinerja yang kurang optimal dan pengurus BUMKam itu sendiri.

3.3. Upaya Pemerintah Kampung dalam Implementasi Program BUMKam di Kampung

Tahima Soroma Kota Jayapura

Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau merupakan lembaga usaha Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dalam upaya memperkuat perekonomian Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau adalah atas prakarsa masyarakat Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dan terdapat intervensi dari pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sebagai pendiri Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar kampung). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau.

4. SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan. Mulai dari komunikasi sudah terstruktur tetapi intensitas dari anggota yang masih kurang sehingga aktivitas pelaksanaan belum bisa berjalan lancar, kurangnya sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana yang belum sepenuhnya terealisasi, sikap sebagian agen pelaksana yang belum bisa menerima program yang telah dibuat, dan struktur birokrasi yang belum jelas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura terdapat faktor kesejahteraan dan faktor partisipasi dalam mendukung pelaksanaaan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau, serta faktor akses dan kontrol yang menghambat pelaksanaaan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. Upaya Pemerintah Kampung Dalam Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perkampungan.

Adapun rekomendasi dari hasil riset ini, *pertama* bagi Pengurus Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau untuk melakukan penyegaran kepengurusan dengan cara melakukan pergantian pengurus sesuai dengan keahlian dibidangnya dan menambah staf pembantu agar program dari Badan Usaha Milik Kampung Di Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau tidak lagi terbengkalai karena kurangnya tenaga manusia. *Kedua*, Bagi Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau untuk diharapkan pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dapat meningkatkan interaksi dan kedulian terhadap Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau dengan cara rutin melakukan kunjungan dan pengarahan terhadap jalannya program Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau. *Ketiga*, Bagi Masyarakat Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau untuk diharapkan kepada masyarakat Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau untuk bersedia berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang telah dibuat oleh Badan Usaha Milik Kampung Tahima Soroma Kayo Pulau.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta: Bandung.
- Bisri, M. H., Alamsyah, A. K., Nuzula, S. R., & Hadi, M. N. (2023). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edikasi Kampung Nanas:(Studi di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 94-110.
- Maryunani. 2007. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia: Bandung.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pentury, G. M., Risambessy, A., Sijabat, A., Leuhery, F., & Latuconsina, Z. (2023). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Sadar Wisata Yang Berbasis Potensi Daerah Di Kampung Baru Banda Neira. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9439-9446.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Kampung*.
- Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*
- Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan dan administrasi publik, hlm 116
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Adiatma: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.